

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN  
 KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN  
 OBJEK WISATA**

**Agil Tamimi<sup>1\*</sup>, Erwin Putubasai<sup>2</sup>, M. Harviend Gilang<sup>3</sup>, Henni Kusumastuti<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

<sup>\*</sup>[agiltamimi4@gmail.com](mailto:agiltamimi4@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Pantai Paku is a coastal tourism attraction located in Paku Village, Kelumbayan District, Tanggamus Regency, Lampung Province. This study aims to identify the role of the village government in developing the Pantai Paku tourism area and its impact on community welfare. A qualitative descriptive approach was used with data collected through interviews, observations, and documentation. The results show that the village government acts as a regulator, facilitator, promoter, and coordinator in tourism development. These roles contribute to increasing community income, creating new employment opportunities, and enhancing local skills in the creative economy sector. Thus, community-based tourism management supported by village government plays a crucial role in improving local welfare and fostering sustainable rural development.*

**Keywords:** *Village Government, Tourism Development, Community Welfare, Pantai Paku.*

**ABSTRAK**

Pantai Paku merupakan salah satu objek wisata bahari yang terletak di Desa Paku, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata Pantai Paku dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, promotor, dan koordinator dalam pengembangan pariwisata. Peran tersebut berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan keterampilan lokal dalam sektor ekonomi kreatif. Dengan demikian, pengelolaan wisata berbasis masyarakat yang didukung oleh pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan warga dan menjadi model pembangunan desa berkelanjutan

**Kata Kunci:** *Peran Pemerintah Desa, Pengembangan Wisata, Kesejahteraan Masyarakat, Pantai Paku.*

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara maritim dikarenakan memiliki lautan yang luas, Luas wilayah lautan Indonesia sangat besar dan sejalan dengan statusnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kemudian hal inilah yang menjadi daya tarik dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang menduduki wilayah pesisir Indonesia untuk memanfaatkan sumberdaya alam sebagai mata pencarian penduduk sekitar seperti mengelola lautan tersebut menjadi destinasi wisata. Indonesia juga dikenal dengan keberagaman pariwisatanya, dan sejalan dengan perkembangan pariwisata secara global, pariwisata di Indonesia telah mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Pantai Paku merupakan salah satu objek wisata alam yang terletak di Desa Paku, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Secara geografis, Pantai Paku berada di pesisir barat Kabupaten Tanggamus dan memiliki koordinat lokasi  $\pm 5^{\circ}34' LS$  dan  $104^{\circ}27' BT$ . Pantai ini termasuk dalam kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, dan dapat ditempuh dengan waktu sekitar 3-4 jam dari pusat kota Bandar Lampung melalui jalur darat yang sebagian besar masih berupa jalan beton dan tanah berbatu. Meskipun akses menuju lokasi belum sepenuhnya memadai, keaslian dan keindahan alam Pantai Paku menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam yang masih asri dan belum terlalu ramai.

Adapun sebidang tanah yang terletak di garis pantai Paku merupakan tanah milik perseorangan dengan status hak milik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang telah di hibahkan kepada Pemerintah Desa Paku untuk kepentingan masyarakat sekitar untuk dikelola menjadi sebuah objek wisata dan mulai berhasil dikembangkan oleh masyarakat setempat sejak tahun 2013. Sebelumnya objek wisata Pantai Paku ini hanya dikunjungi oleh masyarakat sekitar desa untuk menikmati suasana dan berkumpul bersama keluarga untuk bersantai menikmati udara segar.

Namun pada tahun 2019 Pantai Paku Mulai beroperasi untuk umum yang artinya bukan hanya masyarakat setempat saja yang mengunjungi melainkan sudah banyak wisatawan luar yang mengunjungi Pantai Paku. Peningkatan jumlah pengunjung yang selalu terjadi setiap tahun tersebut seharusnya memberikan peluang bagi warga setempat untuk melakukan pengembangan terhadap objek wisata ini. Peluang tersebut dimanfaatkan oleh pemuda/i dengan berinisiatif untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan objek wisata.

Namun dalam melakukan pengembangan objek wisata Pantai Paku ini secara luas, terdapat kendala atau permasalahan yang terjadi yaitu Tata kelola yang masih belum tersusunan seperti pengelolaan administrasi, sarana dan prasarana wisata. Meskipun sudah mulai beroperasi aktif sejak tahun 2019 dan memiliki jam operasional mulai pukul 07.00-17.00 WIB. Pantai Paku hanya ramai pengunjung sebagai objek wisata di hari-hari tertentu saja seperti hari raya, libur tahun baru, dan liburan sekolah saja.

Hal ini terjadi dikarenakan adanya kendala seperti Sumberdaya yang terbatas dimana Pengelolaan wisata hanya melibatkan pemuda/i setempat, kendala selanjutnya yaitu akses jalan menuju tempat wisata sangat buruk dan perlu diperbaiki akses jalan menuju tempat wisata, terakhir yaitu Kurangnya sistem administrasi dan sarana prasarana ini seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah daerah dan pemerintah desa setempat, jika dengan terpenuhi nya sistem administrasi yang baik dan sarana prasarana yang memadai justru akan menarik wisatawan untuk berdatangan dan ini merupakan potensi besar yang harus dimanfaatkan untuk perkembangan ekonomi masyarakat setempat.

Tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah desa yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan pengembangan objek wisata secara efektif dan efisien. Kendala Pemerintah desa pada pengembangan wisata pantai Paku ini juga belum terdapat bantuan dari pemerintah pusat dalam pembangunan dan pengembangan objek wisata dikarenakan dana yang digunakan tidak sedikit dan cukup besar. Selain itu akses jalan untuk mengunjungi wisata pantai Paku masih sangat sulit, sebab masih ada beberapa jalan yang belum diaspal, ketika hujan akan menghambat perjalanan orang yang akan berkunjung di karenakan jalan nya becek dan licin.

Tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah desa yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan pengembangan objek wisata secara efektif dan efisien. Kendala Pemerintah desa pada pengembangan wisata pantai Paku ini juga belum terdapat bantuan dari pemerintah pusat dalam pembangunan dan pengembangan objek wisata dikarenakan dana yang digunakan tidak sedikit dan cukup besar. Selain itu akses jalan untuk mengunjungi wisata pantai

paku masih sangat sulit, sebab masih ada beberapa jalan yang belum diaspal, ketika hujan akan menghambat perjalanan orang yang akan berkunjung di karenakan jalan nya becek dan licin. Dalam rangka proses pengembangan objek wisata pantai paku pemerintah desa paku berperan serta mempromosikan sumberdaya pariwisata yang ada di Desa Paku, Oleh sebab itu diperlukannya pengelolaan dari aspek lingkungan yang terarah dan terencana dari pemerintah untuk menarik minat pengunjung keberlanjutan wisata kedepannya.

Berdasarkan dari identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : “Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Objek Wisata Studi pada Pantai Paku Desa Paku Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus ?”

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pemerintah Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, tanggung jawab kepala desa antara lain menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, dan membina serta memberdayakan masyarakat desa. Kepala desa bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui camat atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya, menurut Riant Nugroho dan Firre An Suprapto (2021:9), pemerintah desa berfungsi sebagai kepala masyarakat desa, sehingga merupakan tingkatan pemerintahan terendah di wilayah Republik Indonesia.

Menurut Ralph Linton peran pemerintah dalam pengembangan wisata dapat dibagi menjadi beberapa dimensi, yaitu:

### **Peran Regulator**

Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek pariwisata, seperti perizinan, standar pelayanan, dan perlindungan lingkungan.

### **Peran Fasilitator**

Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk pengembangan pariwisata, seperti infrastruktur jalan, sarana prasarana, dan upaya pengembangan UMKM Masyarakat.

### **Peran Promotor**

Pemerintah melakukan promosi pariwisata untuk menarik wisatawan.

### **Peran Koordinator**

Pemerintah bertindak sebagai koordinator antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata, seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan akademisi (Isra Hayati ,2021:7).

### **Pengembangan Parwisata**

Samsul Alam Paturusi, menyatakan pengembangan merupakan strategi yang digunakan untuk memajukan, memperkaya, dan memperbaiki keadaan pariwisata suatu objek wisata agar dapat dikunjungi wisatawan (Amerta, 2019:14). Selain itu, dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar tempat wisata, pemerintah, sektor pariwisata, dan masyarakat umum. Menurut Robert Christie Mill, tujuan utama pengembangan pariwisata adalah memaksimalkan pendapatan dan mengurangi masalah. Ada enam tahap pengembangan pariwisata dengan serangkaian konsekuensi dan efek yang berbeda (Amerta, 2019:14). Mengacu pada pernyataan diatas, bahwa dapat penulis simpulkan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya mengandalkan kemampuan bisnis saja tetapi melainkan melibatkan 3 pilar yaitu Masyarakat, Pemerintah dan Pihak swasta.

### Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat secara umum mengacu pada kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan lingkungan hidup yang baik (Bappenas, 2020). Dalam konteks pembangunan pariwisata, kesejahteraan dapat dilihat dari peningkatan kualitas hidup warga sekitar destinasi wisata. Menurut Sen (1999), kesejahteraan mencakup aspek kebebasan berusaha, partisipasi, dan akses terhadap sumber daya. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, Pengertian Kesejahteraan Masyarakat adalah suatu kondisi dimana kondisi tersebut terpenuhi seperti kebutuhan spiritual, material, dan sosial bagi warga negara sehingga dapat hidup layak dan dapat mengembangkan diri untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya sebagai masyarakat.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan aparat desa, masyarakat lokal, dan pelaku wisata, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Peran Pemerintah Desa

Dari pembahasan keempat peran tersebut dapat peneliti disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Paku telah memainkan peran strategis dalam menjaga kesimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian Pantai Paku. Pada peran regulator menekankan aspek kebijakan dan keteraturan, peran fasilitator mendukung dari sisi infrastruktur dan pemberdayaan, peran promotor memperkuat kesadaran dan partisipasi masyarakat, dan peran koordinator menjembatani berbagai pihak agar terlibat dalam pengelolaan secara harmonis dan terpadu.

#### Kesejahteraan Masyarakat

Pada keterlibatan masyarakat peneliti dapat menyimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat di Desa Paku telah menunjukkan adanya rasa memiliki terhadap Kawasan wisata yang akhirnya memperkuat komitmen masyarakat dalam menjaga kebersihan, keindahan, dan keamanan lingkungan. Selain itu, masyarakat juga aktif dalam memberikan masukan ide dan gagasan terkait pengembangan wisata yang menunjukkan telah terbentuknya ruang partisipasi yang aktif antar warga dan pemerintah.

Menurut Peneliti Model pengelolaan wisata berbasis masyarakat yang diterapkan di Pantai Paku juga memperlihatkan prinsip-prinsip ekowisata yang menekankan keterlibatan lokal, pelestarian lingkungan dan kebermanfaatan ekonomi. Partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi kekuatan utama dalam menjamin keberlanjutan wisata, karena masyarakat memiliki peran gandasebagai pelaku, penjaga dan penerima manfaat.

#### Persepsi Wisatawan terhadap Pengelolaan Objek Wisata Pantai Paku

Persepsi wisatawan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan suatu destinasi wisata.

#### Aksesibilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa wisatawan, diketahui bahwa akses menuju Pantai Paku masih menjadi kendala utama dalam pengembangan wisata. Sebagian besar pengunjung menyebutkan bahwa jalan menuju lokasi masih belum sepenuhnya baik, terutama menjelang lokasi pantai, di mana kondisi jalan sempit, berbatu, dan licin saat musim hujan. Akses yang sulit ini menjadi hambatan utama bagi wisatawan luar daerah. Dalam konteks teori

transportasi pariwisata, Leiper (1990) menyatakan bahwa aksesibilitas yang buruk dapat menurunkan niat kunjungan dan mengurangi kenyamanan wisatawan, meskipun daya tarik utamanya cukup tinggi.

#### Ketersediaan Fasilitas

Fasilitas pendukung merupakan komponen penting dalam membentuk kualitas destinasi wisata. Wisatawan mengungkapkan bahwa fasilitas di Pantai Paku masih tergolong minimalis dan belum terstandar. Meski tersedia kamar mandi umum, gazebo, dan tempat parkir, jumlah dan kualitasnya belum memadai. Fasilitas kebersihan pun belum dikelola dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Gunn (1994), yang menyatakan bahwa fasilitas penunjang merupakan salah satu dari lima elemen utama sistem destinasi pariwisata, dan kekurangan pada aspek ini dapat memengaruhi citra dan daya saing destinasi.

#### Daya Tarik Wisata

Daya tarik utama Pantai Paku menurut wisatawan terletak pada keaslian dan kealamian lingkungannya, seperti pasir putih, ombak yang bersih, serta suasana yang masih tenang dan tidak terlalu ramai. Hal ini menjadi nilai jual yang tinggi dalam perspektif ekowisata. Pendapat ini sesuai dengan teori dari Fennell (2003), yang menyatakan bahwa wisata berbasis alam yang masih alami dan minim polusi visual sangat disukai oleh wisatawan yang mencari ketenangan dan pengalaman autentik. Namun demikian, wisatawan juga menyayangkan bahwa promosi dan pemasaran Pantai Paku masih kurang, sehingga belum banyak dikenal secara luas di luar daerah.

#### Pelayanan dan Pengelolaan

Pelayanan yang diberikan oleh masyarakat dan pengelola Pantai Paku dinilai cukup ramah, namun belum terstruktur secara profesional. Tidak adanya petugas informasi atau pemandu wisata membuat wisatawan kesulitan memahami batas batas dan potensi lain dari lokasi. Dalam teori manajemen destinasi menurut Cooper et al. (2008), pengelolaan destinasi yang baik melibatkan tidak hanya penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga pelayanan informasi, keamanan, dan manajemen pengunjung yang efektif.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Pengembang objek Wisata Pantai Paku dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

Peran sebagai Regulator, Pemerintah Desa Paku telah menjalankan fungsinya dalam menetapkan aturan-aturan dasar yang mengatur tata kelola objek wisata Pantai Paku. Hal ini terlihat dari penyusunan peraturan desa yang berkaitan dengan pengelolaan wisata, termasuk pengaturan retribusi, kebersihan, dan keamanan lingkungan. Peran ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan keteraturan dalam aktivitas wisata.

Peran sebagai Fasilitator, Pemerintah Desa menunjukkan peran aktif dalam memfasilitasi masyarakat dengan membuka akses terhadap berbagai pelatihan, perizinan usaha, dan bantuan sarana prasarana wisata. Pemerintah desa juga memediasi antara masyarakat lokal dengan pihak eksternal, seperti Dinas Pariwisata atau investor, guna mempercepat pengembangan objek wisata.

Peran sebagai Promotor, Pemerintah Desa turut mempromosikan objek wisata Pantai Paku melalui berbagai media, baik secara konvensional maupun digital. Strategi promosi dilakukan dengan menggandeng media sosial, menyelenggarakan event lokal, serta menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk menarik minat wisatawan. Promosi ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Paku dalam beberapa tahun terakhir.

Peran sebagai Koordinator, Pemerintah Desa menjalankan fungsi koordinatif dengan membentuk dan mengarahkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) serta melibatkan pemuda dan masyarakat sekitar dalam kegiatan wisata. Koordinasi juga dilakukan antar lembaga desa serta dengan stakeholder terkait agar pengembangan wisata berjalan terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi Masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa perlu memperkuat regulasi pengelolaan wisata dengan memperjelas batas kewenangan, menyusun SOP yang terstandar, dan meningkatkan kapasitas aparat desa dalam penegakan aturan secara adil dan konsisten.
2. Peningkatan kapasitas masyarakat harus menjadi prioritas, terutama melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan UMKM, serta pelibatan kelompok rentan (perempuan, pemuda, dan nelayan) dalam kegiatan wisata.
3. Diversifikasi ekonomi berbasis wisata perlu dikembangkan untuk menghindari ketergantungan tunggal pada musim wisata, misalnya dengan mengembangkan wisata budaya, agrowisata, dan produk lokal berbasis komunitas.
4. Pemerintah desa bersama pemangku kepentingan hendaknya membentuk forum koordinasi tetap untuk mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan wisata secara terpadu, partisipatif, dan transparan.
5. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan harus terus ditanamkan melalui edukasi, kampanye sadar wisata, serta insentif sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang aktif menjaga kebersihan dan kelestarian Pantai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, D., Lestari, H., & Rostyaningsih, D. (2023). Peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata edukasi gerabah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 13-31.
- Alfianto, F. Y. (2021). Peran pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Pakuncen. *Paradigma*, 10(1).
- Fansuri, R. A. (2020). Peran kelompok sadar wisata (POKDARWIS) dalam pengembangan objek wisata sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat: studi di wisata alam Otak Aik Tojang Dusun Gelogor Desa Lendang Nangka (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Fahira, N. S., Umar, R., & Habibi, M. M. (2022). Peran Pemerintah desa Purworejo pengembangan wisata alam sumber complang dalam Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(3), 291-303.
- Hidayat, E. S., & Djadjuli, R. D. (2020). Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 277-293.
- Kusumastuti, H., Dewi, L. K., & Rauf, E. U. T. (2020, November). Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Konflik Sosial di Pekon Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. In Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Vol. 1, No. 1, pp. 281-290).
- Iswanti, S. I. S., & Zulkarnaini, Z. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan Di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 92-103.
- Jayanti, N. P. (2019). Pengembangan Objek Wisata Pantai Gandoriah Kota Pariaman. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 6(2), 141-146.

- Khairil. (2023). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Polongasa Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.
- Nainggolan, C. R. A. (2024). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Samosir (Studi Pada Kampung Ulos Hutaraja). *Journal of Politic and Government Studies*, 13(2), 568-582.
- Perdana, M. H. G. (2022). Pembudidayaan Ikan Lele Dengan Memanfaatkan Lahan Pertanian Kelompok Wanita Tani Sebagai Bentuk Kegiatan Wirausaha. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 3(02), 82-88.
- Perdana, M. H. G., Miranda, Z., & Junaiedi, A. (2023). Menanamkan Pemahaman Masyarakat Dalam Memaksimalkan Pemanfaatan Barang Bekas yang Mengandung Potensi Ekonomi, Melalui Sosialisasi Bank Sampah Di Pekon Sidorejo, Kecamatan Sumber Rejo, Kabupaten Tanggamus Tahun 2023. *Devotion: Journal Corner of Community Service*, 1(4), 204-211.
- Piki, Desi, Erwin. (2020). Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan, 80-81.
- Pratama, F. C. (2016). Analisis Peran Pemerintah dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Gandoriah dan Pulau Angso Duo di Kota Pariaman (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Putubasai, E. (2018). Analysis of Community and Village Government Participation in Village Fund Management. *Saburai International Journal of Social Sciences and Development*, 2(1), 32-38.
- Rippin, K. S. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Polongasa Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Rusyidi, B., & Fedryansah, M. (2018). Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 155-165.
- Sinaga, K., Nasution, M. A., & Dewi, A. T. (2021). Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat. *Publik*, 8(1), 79-90.
- Syafudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). Peran pemerintah Desa dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui Desa wisata (studi Di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 365-380.
- Wati, Anida (2018). Analisis Peranan Objek Wisata Talang Indah Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Masyarakat Desa Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu) Skripsi. Undergraduate Thesis, Uin Raden Intan Lampung.
- Zitri, d. (2020). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Obyek Wisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism). *Indonesian Governance Journal*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tanggung Jawab Kepala Desa
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Masyarakat
- Undang-Undang No.10 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataan
- Pemerintah Desa Paku. (n.d.). Website resmi Desa Paku Kecamatan Kelumbayan. <https://paku-kelumbayan.desa.id/>